



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas



Progres dan Prospek Pembangunan Infrastruktur

Disiapkan untuk INDOBUILDTECH 2018

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

2 Mei 2018



Progres Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas

**Progres Kebijakan Pendukung Pembangunan
Infrastruktur pada Tahun 2017**

Pencapaian Infrastruktur pada Tahun 2017



Progres Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas

**Progres Kebijakan Pendukung Pembangunan
Infrastruktur pada Tahun 2017**

Pencapaian Infrastruktur pada Tahun 2017

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019...

Proyek Logistik



Konsep Tol Laut agar Indonesia menjadi poros maritim dunia

- Pembangunan 24 pelabuhan laut baru
- Meningkatkan jumlah kapal (*pioneer cargo, transport vessels, pioneer crossing vessels*)
- Membangun 60 pelabuhan penyeberang



Memperkuat konektivitas melalui pembangunan infrastruktur udara

- Pembangunan 15 pelabuhan udara baru
- Pembangunan fasilitas *air cargo* di 6 lokasi
- Menambah jumlah pelabuhan udara perintis



Revitalisasi efisiensi jalan dengan pembangunan dan perbaikan jalan

- Pembangunan 2,650 km jalan baru
- Pembangunan 1,000 km jalan tol baru
- Rehabilitasi 46,770 km jalan eksisting



Mengurangi biaya logistik melalui infrastruktur kereta api dengan membangun jalur baru di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan

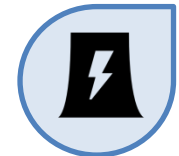
- 2,159 km kereta antar kota
- 1,099 km kereta dalam kota



Pengembangan transpor urban

- Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di 29 kota
- Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di 6 kota metropolitan dan 17 kota besar

Proyek Energi



Tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 96.6% pada tahun 2019 dengan pengembangan kapasitas

- Pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas 35,000 MW



Mencapai ketahanan pangan melalui pengembangan sistem irigasi

- Pembangunan 33 dam baru dan 30 PLTA
- Pengembangan 1 million ha sistem irigasi
- Rehabilitasi sistem irigasi yang ada



Memastikan suplai dari bahan bakar dengan memaksimalkan kilang minyak domestik

- Pembangunan kilang minyak baru 2x300,000 bpd
- Pengembangan Kilang Minyak Cilacap dan Balongan

...dan diturunkan menjadi **Proyek Strategis Nasional** dan **Proyek Prioritas**

Definisi

RPJMN 2015-2019

Merupakan proyek-proyek yang tercantum dalam RPJMN dan sebagian besar menjadi RENSTRA tiap-tiap K/L teknis terkait.

Proyek Strategis Nasional

Merupakan **245 PSN** dan **2 Program** dengan kriteria strategis yang tersebar secara nasional dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 yang diubah melalui Peraturan Presiden 58 Tahun 2017

Proyek Prioritas

Merupakan **37 Proyek Prioritas** yang memiliki dampak ekonomi tinggi dan ditetapkan melalui Peraturan Menko Perekonomian No. 12 Tahun 2015 yang diubah melalui Permenko No. 5 Tahun 2017 dan akan dipantau serta didukung oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Proyek Strategis Nasional dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

Kriteria Dasar

- Kesesuaian dengan RPJMN dan/atau Renstra.
- Kesesuaian dengan tata ruang.
- Atau diatur khusus dalam PP atau Perpres khusus.

Kriteria Strategis

- Memiliki peran strategis atas perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional (memiliki dampak positif atas PDB, pengangguran, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup).
- Keselarasan antar berbagai sektor infrastruktur (saling mendukung atau *complementary*).
- Distribusi proyek secara regional.

Kriteria Operasional

- Proposal proyek baru harus memiliki studi kelayakan yang berkualitas.
- Nilai investasi harus di atas Rp 100 miliar
- Konstruksi harus dimulai paling lambat di 2018
- Untuk sektor migas dan industri pesawat, persetujuan *Plan of Development* (POD) paling lambat tahun 2018.

Analisis kriteria tambahan meliputi:

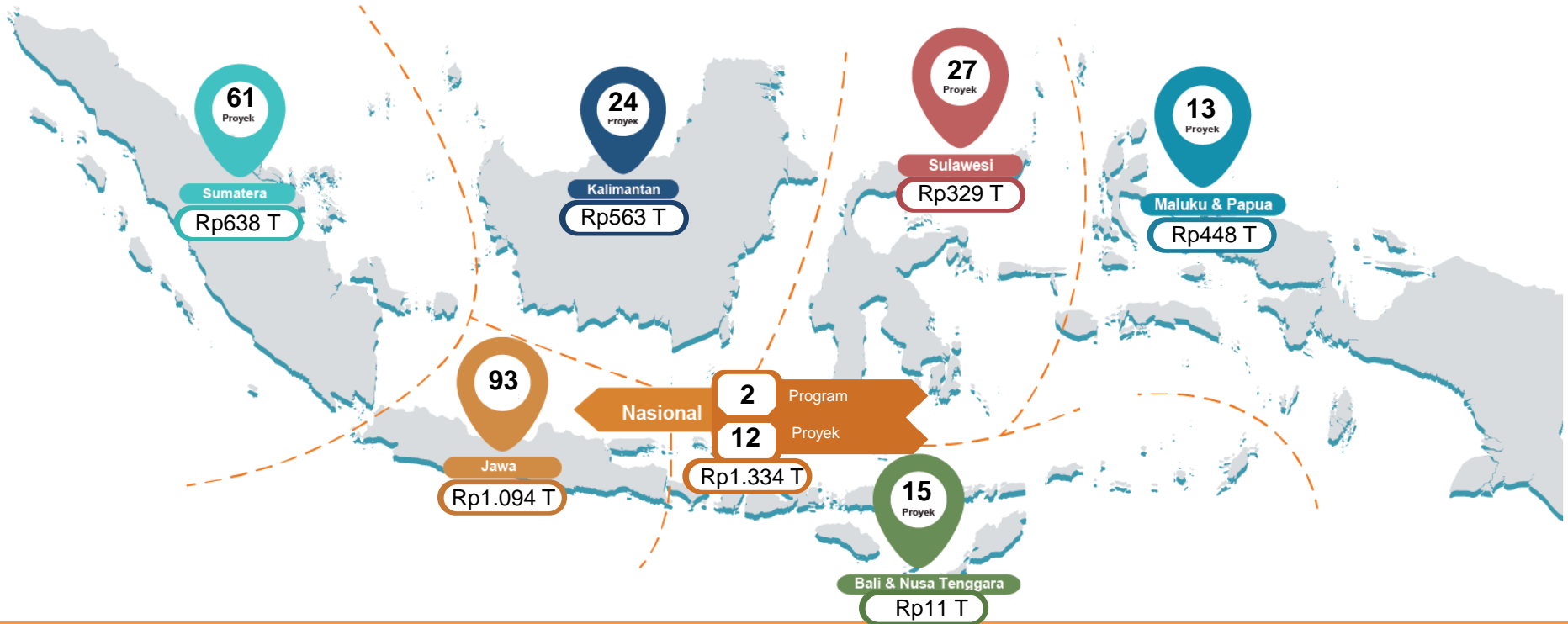
Champion yang jelas

- Proyek harus memiliki Penanggung Jawab Proyek yang jelas dan Kementerian terkait memiliki komitmen dalam menjalankan proyek (terutama rencana aksi dan jadwal yang jelas).

EIRR

- KPPIP tidak hanya memperhatikan proyek dengan nilai yang tinggi, namun juga akan fokus atas proyek yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Karenanya, idealnya proyek KPPIP memiliki EIRR dengan *quartile* teratas dari proposal yang ada.

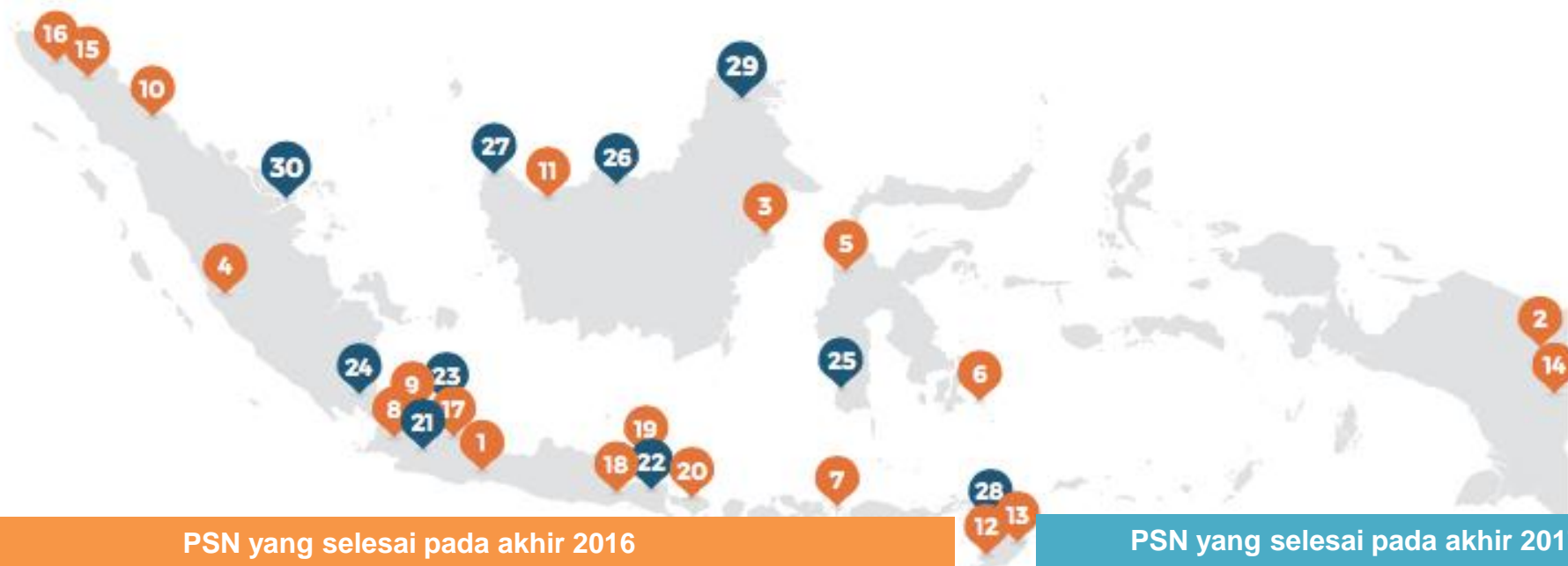
Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) ditetapkan berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2017 j.o. Perpres No. 3 Tahun 2016 mencakup 245 Proyek + 2 Program



PSN mencakup 15 sektor proyek serta 2 sektor program



Sampai dengan akhir 2017, telah terdapat 30 PSN yang selesai dengan total nilai investasi Rp 94,8 Triliun



PSN yang selesai pada akhir 2016

1	Jalan Tol Gempol – Pandaan, Jatim (14km)	11	PLBN & SP Entikong, Kab. Sanggau, Kalbar
2	Bandara Sentani, Jayapura, Papua	12	PLBN & SP Mota'ain, Kab. Belu, NTT
3	Bandara Juwata, Tarakan, Kaltara	13	PLBN & SP Motamassin, Kab. Malaka, NTT
4	Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu	14	PLBN & SP Skouw, Kota Jayapura, Papua
5	Bandara Mutiara, Palu	15	Bendungan Paya Seunara, Kota Sabang, NAD
6	Bandara Matahora, Wakatobi, Sultra	16	Bendungan Rajui, Kab. Pidie, NAD
7	Bandara Labuan Bajo, Pulau Komodo, NTT	17	Bendungan Jatigede, Kota Sumedang, Jabar
8	Pengembangan Bandara Soekarno Hatta (Termasuk Terminal 3), Banten	18	Bendungan Bajulmati, Banyuwangi, Jatim
9	Pelabuhan Kalibaru, DKI Jakarta	19	Bendungan Nipah, Madura, Jatim
10	Pipa Gas Belawan-Sei Mengkei kapasitas 75 mmscfd, Sumut	20	Bendungan Titab, Kab. Buleleng, Bali

PSN yang selesai pada akhir 2017

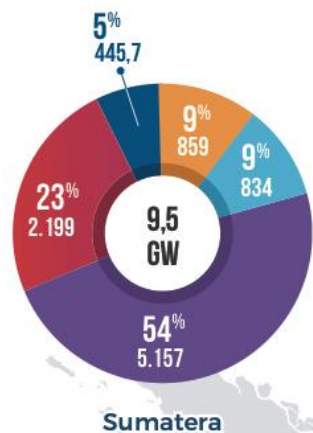
21	Jalan Tol Soreang – Pasirkoja, Jabar (11km)
22	Jalan Tol Mojokerto – Surabaya, Jatim (36,3km)
23	Jalan Akses Tanjung Priok, DKI Jakarta (16,7km)
24	Bandara Raden Inten II, Lampung
25	Pengembangan Lapangan Jangkrik dan Jangkrik North East Wilayah Kerja Muara Bakau, Kaltim
26	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Nanga Badau, Kab Kapuas Hulu, Kalbar
27	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Aruk, Kab Sambas, Kalbar
28	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Wini, Kab Timor Tengah Utara, NTT
29	Bendungan Teritip, Kaltim
30	Pembangunan Saluran Suplesi Daerah Irigasi Umpu Sistem (Way Besai), Lampung

Selain itu, terdapat 37 proyek dan 1 program dalam tahap konstruksi dan telah beroperasi sebagian senilai Rp 1.478,9 Triliun

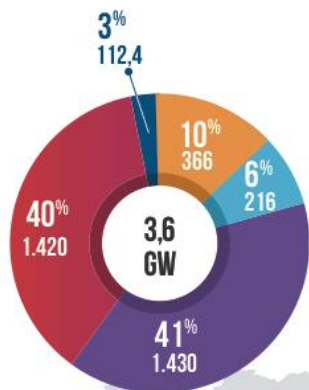


1	Jalan Tol Medan - Binjai (16km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	11	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (21,04km)	21	Technopark	31	Kawasan Industri <i>Java Integrated Industrial Port Estate</i> (JIPE), Gresik
2	Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya (22km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	12	Pembangunan Jalan Lingkar Trans Morotai (231,84km)	22	Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	32	Kawasan Industri Dumai
3	Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar (140,9km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	13	Kereta Api Prabumulih - Kertapati (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	23	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung	33	Kawasan Industri Wilmar Serang
4	Jalan Tol Medan - Kualanamu - Lubuk Pakam - Tebing Tinggi (62km)	14	<i>Double Track</i> Jawa Selatan	24	Kawasan Industri Ketapang	34	Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya
5	Jalan Tol Pejagan - Pemalang (57,5km)	15	Kereta Api Ekspres SHIA (Soekarno Hatta – Sudirman)	25	Kawasan Ekonomi Khusus Palu	35	Pembangunan <i>Smelter</i> Ketapang
6	Jalan Tol Semarang - Solo (72,6km)	16	Pengembangan Pelabuhan Kupang	26	Kawasan Industri Bantaeng	36	Pembangunan <i>Smelter</i> Morowali
7	Jalan Tol Solo - Ngawi (90,1km)	17	Pembangunan Rumah Susun	27	Kawasan Industri Morowali	37	Pembangunan <i>Smelter</i> Konawe
8	Jalan Tol Ngawi - Kertosono (87km)	18	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	28	Kawasan Industri Konawe	38	1 Program Ketenagalistrikan
9	Jalan Tol Kertosono - Mojokerto (40,5km)	19	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	29	Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika		
10	Jalan Tol Gempol - Pasuruan (34,2km)	20	Palapa Ring <i>Broadband</i> di 457 Kab/ Kota melalui Pola Non KPBU	30	Kawasan Industri Kendal		

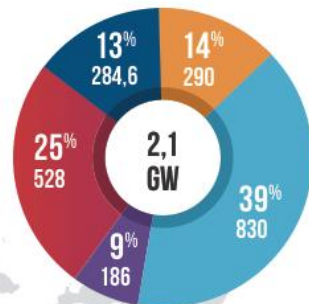
Status pencapaian Program Ketenagalistrikan pada Desember 2017



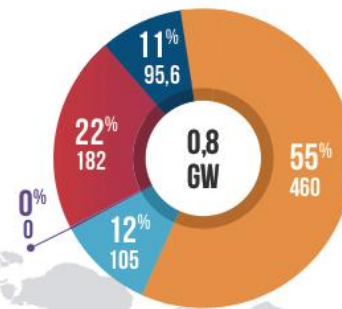
Sumatera



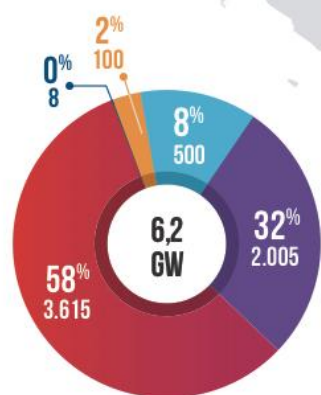
Kalimantan



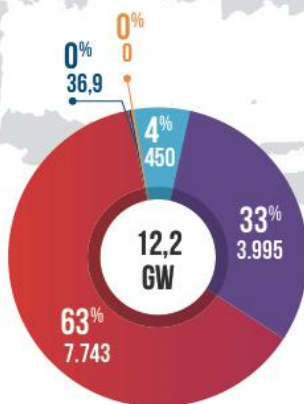
Sulawesi



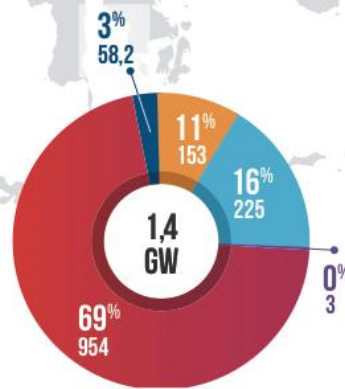
Maluku & Papua



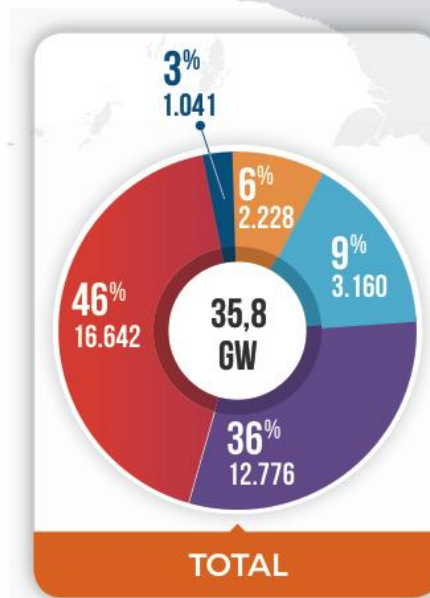
Jawa Bagian Barat



Jawa Bagian Tengah



Jawa Bagian Timur, Bali, & Nusa Tenggara



TOTAL

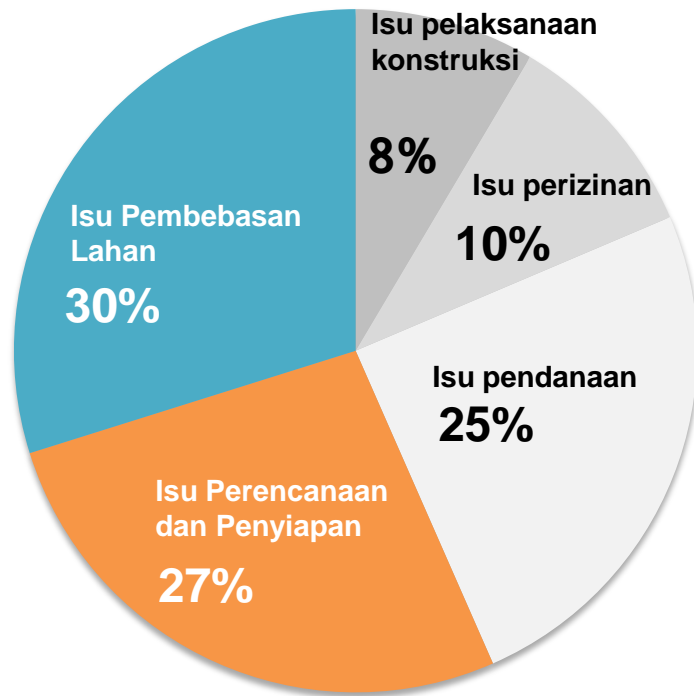
● Perencanaan
 ● Kontrak Belum Konstruksi
 ● COD/SLO/Komisioning

● Pengadaan
 ● Kontrak Proses Konstruksi

Sumber: Presentasi PLN 14 Desember 2017

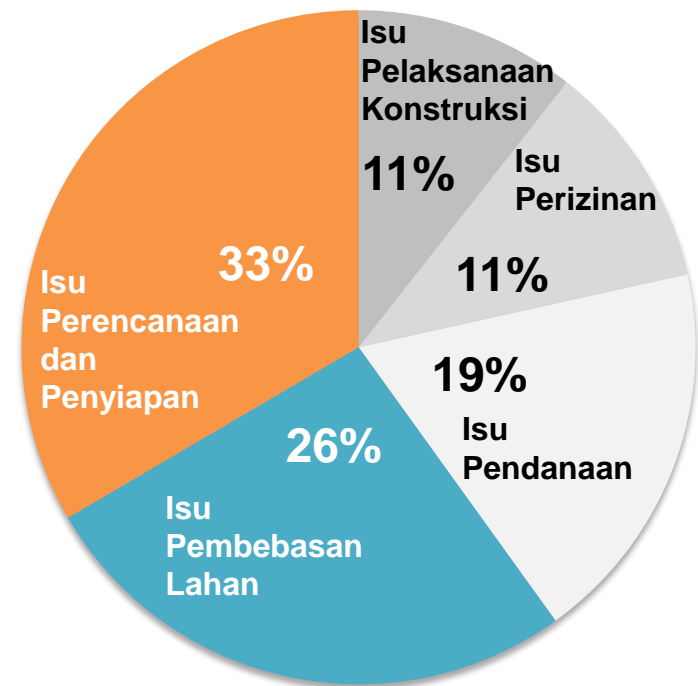
Isu yang dihadapi pada penyediaan PSN tahun 2016 dan tahun 2017

Persentase isu yang dihadapi dalam penyediaan PSN pada Desember 2016



Pada akhir tahun 2016, isu utama dalam penyediaan PSN adalah **isu yang berkaitan dengan pembebasan lahan** dengan presentase mencapai **30%**.

Persentase isu yang dihadapi dalam penyediaan PSN pada Desember 2017



Pada akhir tahun 2017, isu utama dalam penyediaan PSN adalah **isu yang berkaitan dengan perencanaan dan penyiapan proyek** dengan presentase mencapai **33%**.

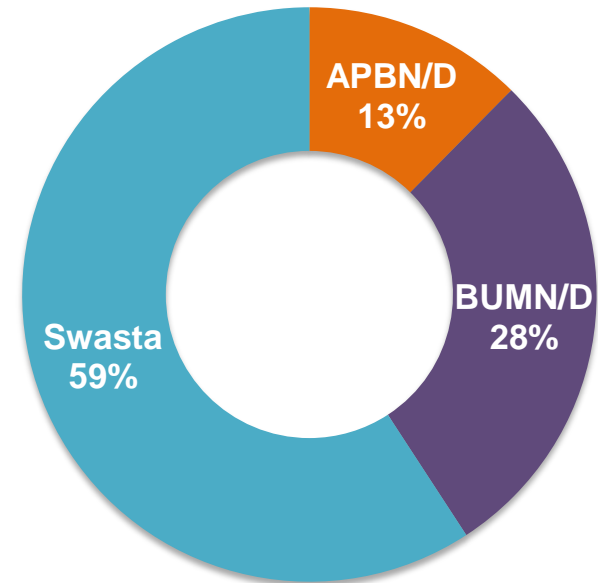
Nilai Investasi Proyek Strategis Nasional mencapai Rp 4.417 Triliun

NILAI INVESTASI PSN

PSN membutuhkan pendanaan yang berasal baik dari APBN/D, partisipasi BUMN/D dan/ atau partisipasi pihak swasta


Estimasi kebutuhan pendanaan¹ untuk 245 Proyek + 2 Program PSN:

Total Nilai Investasi	APBN	Rp 547 Triliun
Rp 4.417 Triliun	BUMN/D	Rp 1.255 Triliun
	Swasta	Rp 2.615 Triliun



¹Tidak termasuk 12 Proyek yang belum diketahui nilai investasinya

5 Sektor dengan nilai investasi tertinggi


Energi
12 Proyek
Rp 1.255 Triliun


Ketenagalistrikan
1 Program
Rp 1.036 Triliun


Jalan
74 Proyek
Rp 705 Triliun


Kereta
23 Proyek
Rp 624 Triliun


Kawasan
30 Proyek
Rp 388 Triliun

Berdasarkan estimasi realisasi dan kebutuhan pendanaan PSN, partisipasi swasta memiliki kontribusi terbesar...

Rencana alokasi pendanaan untuk 245 Proyek + 2 Program :

Sumber Pendanaan (Rp Miliar) ^{1,2}	Realisasi Pendanaan PSN		Kebutuhan Pendanaan PSN			Total
	≤2016 ³	2017	2018	2019	≥2020	
1. APBN/D	78.414	49.892	64.829	85.768	268.591	547.494
2. BUMN/D	72.942	77.064	111.430	169.765	823.561	1.254.761
3. Swasta	481.860	251.313	193.796	274.581	1.413.884	2.615.433
TOTAL	633.216	378.268	370.056	530.113	2.506.036	4.417.689

¹Tidak termasuk 12 proyek yang belum diketahui data nilai investasinya

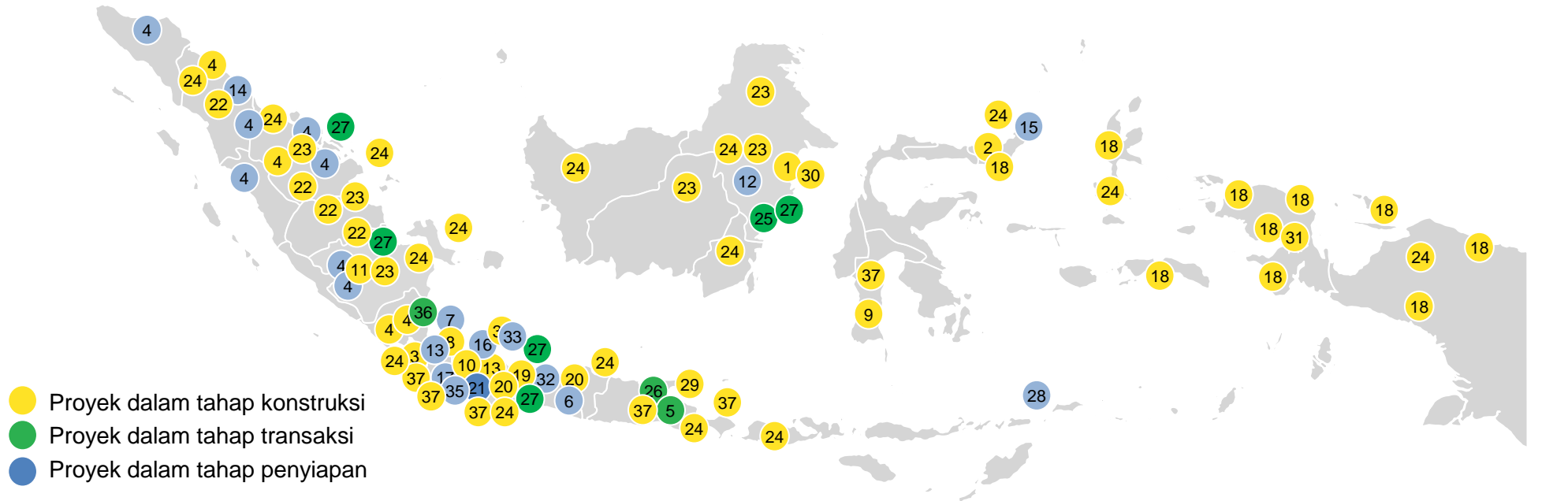
²Dana sebesar Rp215.852 miliar (*capex* dan *opex*) dari 26 proyek yang sumber dananya telah diketahui namun belum diketahui rincian kebutuhan per tahunnya dikelompokkan ke dalam kebutuhan pendanaan ≥2020.

³Realisasi pendanaan adalah alokasi dana yang dilaporkan Penanggung Jawab proyek pada tahun 2017 dan sebelumnya.

Asumsi pada pengelompokan alokasi pendanaan:

1. Untuk proyek dengan skema KPBU dan belum diketahui alokasi APBN yang dibutuhkan, maka seluruh nilai investasi dialokasikan pada Swasta
2. Untuk proyek dengan skema penugasan BUMN dan belum diketahui alokasi APBN yang dibutuhkan, maka seluruh nilai investasi dialokasikan pada BUMN

Melalui Permenko Ekonomi No.5 Tahun 2017 ditetapkan 37 Proyek Prioritas



- Proyek dalam tahap konstruksi
- Proyek dalam tahap transaksi
- Proyek dalam tahap penyiapan

1. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
2. Jalan Tol Manado-Bitung
3. Jalan Tol Panimbang-Serang
4. 15 Ruas Jalan Tol Trans Sumatera
5. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
6. Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
7. SHIA Express Railway
8. MRT Jakarta Jalur Utara-Selatan
9. Kereta Api Makassar – Parepare
10. Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
11. Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan
12. Kereta Api Kalimantan Timur

13. Light Rail Transit (LRT) DKI Jakarta
14. Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung
15. Pelabuhan Hub Internasional Bitung
16. Pelabuhan Patimban
17. Inland Waterways/Cikarang – Bekasi – Laut (CBL)
18. Palapa Ring Broadband
19. PLTU Batang/Central Java Power Plant (CJPP)
20. Central – West Java Transmission Line 500 kV
21. PLTU Indramayu
22. Transmisi Sumatera 500 kV (4 Provinsi)
23. PLTU Mulut Tambang (5 Provinsi)
24. Pembangkit Listrik Berbasis Tenaga Gas (18 Provinsi)
25. Kilang Minyak Bontang

26. Kilang Minyak Tuban
27. RDMP/Revitalisasi Kilang Minyak Eksisting (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju)
28. Lapangan Abadi WK Masela
29. Utilisasi Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru
30. Indonesian Deepwater Development (IDD)
31. Pembangunan Tangguh LNG Train 3
32. SPAM Semarang Barat
33. Sistem Pengolahan Limbah Jakarta
34. National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A
35. SPAM Jatiluhur
36. SPAM Lampung
37. Waste to Energy Program di 8 Kota

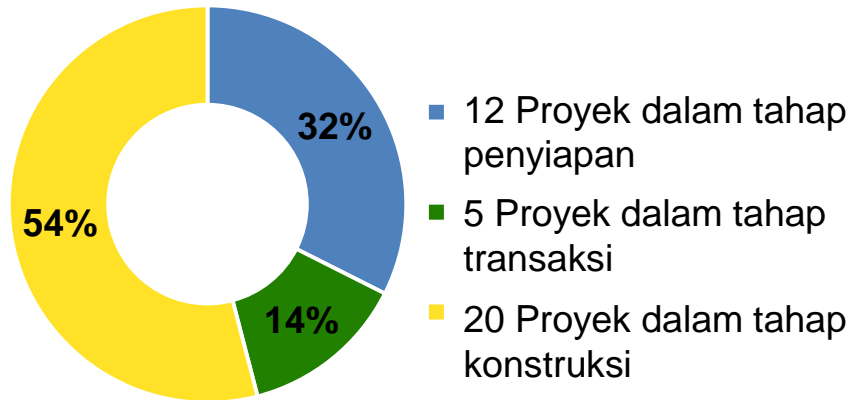


Catatan:

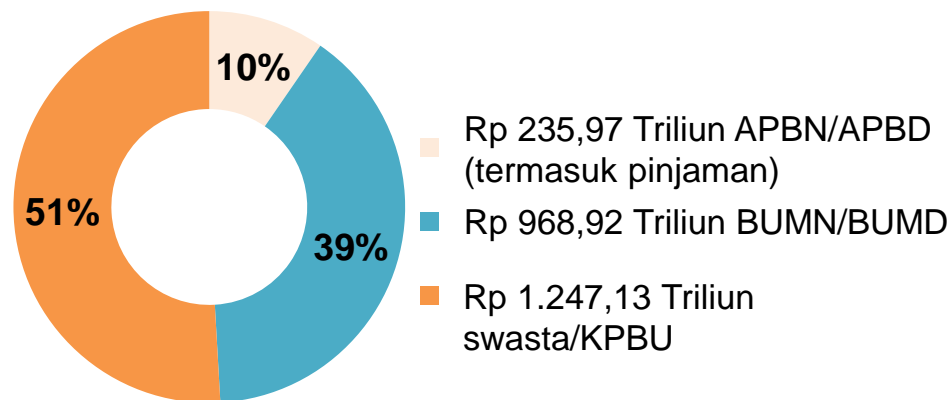
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
 Proyek Prioritas baru dalam warna merah

Status kemajuan 37 proyek prioritas per Maret 2018

Status kemajuan 37 proyek prioritas



Skema Pendanaan untuk 37 Proyek Prioritas



Milestone yang baru dicapai

- ✓ **Jalan Tol Yogyakarta – Bawen**
Outline Business Case Jalan Tol Yogyakarta – Bawen telah selesai disusun pada akhir Desember 2017
- ✓ **Pelabuhan Hub Internasional (PHI) Bitung:**
Outline Business Case PHI Bitung telah selesai disusun pada akhir Desember 2017
- ✓ **Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Jalur Selatan-Utara:**
Komposisi pembebanan pinjaman MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara untuk tambahan Fase I dan Fase II telah diputuskan dalam Rapat KPPIP tingkat Menteri, yaitu 49% Pemerintah Pusat dan 51% Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- ✓ **Pelabuhan Patimban:**
Loan Agreement telah ditandatangani pada 15 November 2017.
- ✓ **Kilang Minyak Bontang:**
Pertamina telah memilih konsorsium Overseas Oil and Gas (Oman) dan Cosmo Energy Group (Jepang) sebagai mitra strategis.
- ✓ **SPAM Semarang Barat:**
Tahap Prakualifikasi telah dimulai pada Januari 2018.



Progres Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas

Progres Kebijakan Pendukung Pembangunan
Infrastruktur pada Tahun 2017

Pencapaian Infrastruktur pada Tahun 2017

15 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diterbitkan, dengan 10 paket yang berkaitan dengan deregulasi untuk percepatan infrastruktur

- I**
- Deregulasi
 - Percepatan Proyek Strategis
 - Perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah

- II**
- Penerbitan Perizinan dalam waktu 3 jam
 - Penghapusan PPN untuk industri transportasi
 - Fasilitas logistik yang terintegrasi

- III**
- Menurunkan harga BBM dan listrik
 - Simplifikasi perizinan lahan pada kegiatan investasi
 - Memperluas penerima pinjaman Usaha Kecil

- IV**
- Sistem upah yang adil, sederhana dan bisa diproyeksikan
 - Kemudahan keterjangkauan Kredit Usaha Kecil

- V**
- Revaluasi aset untuk keringanan pajak
 - Menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Estate, Properti dan Infrastruktur.

- VI**
- Pengembangan KEK
 - Mempermudah sistem penyediaan air
 - Simplifikasi perizinan impor bahan baku obat

- VII**
- Percepatan Proses Sertifikasi Tanah
 - Insentif pajak untuk industri padat karya

- VIII**
- Kebijakan Satu Peta
 - Pembangunan Kilang Minyak
 - Insentif untuk industri pesawat

- IX**
- Percepatan pembangunan Infrastruktur Kelistrikan
 - Stabilisasi Harga Daging
 - Deregulasi di Sektor Logistik

- X**
- Pengurangan hambatan investasi


- XI**
- Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE)
 - *Indonesia single Risk Management*

- XII**
- Penyederhanaan Prosedur Perizinan, Durasi dan Biaya Memulai Bisnis di Indonesia

- XIII**
- Mempercepat pembangunan perumahan yang terjangkau, dengan mengurangi, mengintegrasikan, dan mempercepat proses perizinan

- XIV**
- *Roadmap* untuk industri *e-commerce* nasional
 - Memperluas dan mempermudah akses pendanaan
 - Insentif pajak

- XV**
- Pengurangan biaya untuk pengiriman barang dan logistik
 - Penguatan kelembagaan dan kewenangan *Indonesia National Single Window*

 PKE terkait infrastruktur

Inisiatif kebijakan-kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2017 di Sektor Transportasi

SEKTOR KERETA API



PP No. 6/2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Peraturan ini **memungkinkan pembentukan Badan Usaha Perkeretaapian untuk dilibatkan dalam proyek perkeretaapian yang tidak diminta tanpa proses penawaran** setelah Badan Usaha Kereta Api menerima persetujuan proposal dari Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Ini bisa dilakukan jika tidak ada keterlibatan APBN / APBD dalam investasi proyek

Regulasi Terdahulu: Peraturan Pemerintah. No. 56/2009



Peraturan Presiden No. 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka untuk Investasi

Sektor perkeretaapian tidak termasuk dalam daftar negatif investasi. **Ini telah memperluas peluang bagi investasi asing untuk terlibat dalam sektor perkeretaapian**, baik di infrastruktur kereta api maupun sarananya.

Regulasi Terdahulu: Peraturan Presiden No. 39/2014

SEKTOR PELABUHAN



Peraturan Menteri Transportasi No. 24/2017 tentang Penghapusan Kebutuhan Modal dalam Kegiatan Terkait Pengiriman dan Navigasi

Peraturan ini **menghilangkan modal minimum dan modal disetor yang dipersyaratkan oleh Badan Usaha Pelayaran dan Navigasi terkait**. Dengan mengeluarkan peraturan ini, Pemerintah Indonesia mengharapkan dorongan investasi di sektor pelayaran dan navigasi.

Regulasi Terdahulu: Peraturan Menteri Transportasi. 152/2016, Peraturan Menteri Transportasi. 146/2016, Peraturan Menteri Transportasi. No. 11/2016, Peraturan Menteri Transportasi. No. 45/2015, Peraturan Menteri Transportasi. 51/2015 and Peraturan Menteri Transportasi. No. 93/2013

Inisiatif kebijakan-kebijakan lain telah dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2017 di Sektor Energi dan Sektor Air

SEKTOR ENERGI



Peraturan Presiden No. 14/2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Listrik

Peraturan ini memungkinkan PLN menunjuk anak perusahaannya secara langsung untuk penyediaan listrik. Kebutuhan konten lokal yang lebih tinggi dapat dipenuhi melalui komitmen. Oleh karena itu, PLN melalui anak perusahaannya dapat bermitra dengan entitas asing yang telah menunjukkan komitmen mereka dalam menyediakan alat dan komponen listrik, memanfaatkan sumber daya manusia lokal dan memastikan transfer teknologi sambil melakukan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan Program Listrik Tenaga Listrik Pemerintah Indonesia seluas 35.000 MW.

Peraturan Terdahulu: Peraturan Presiden No. 4/2016

SEKTOR AIR



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 19/2016 tentang Dukungan Pemerintah untuk PPP dalam Penyediaan Air Minum

Peraturan ini memungkinkan skema PPP diterapkan untuk proyek penyediaan air minum yang tidak layak secara finansial. Selain itu, definisi tersebut menetapkan definisi yang jelas tentang siapa Badan Penandatanganan Pemerintah (Government Contracting Agency / GCA) dan lingkup kerja yang jelas. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan menjadi GCA dan bertindak sebagai mitra investor swasta. Ruang lingkup kerja sama juga terdefinisi dengan jelas, mulai dari air curah hingga distribusi utama. Definisi yang jelas ini menetapkan dasar kuat bagi keterlibatan investor swasta dalam memajukan infrastruktur sistem penyediaan air minum.

Peraturan Terdahulu: Peraturan Pemerintah No. 56/2009

Inisiatif kebijakan-kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2017 di Sektor Jalan dan Jembatan

SEKTOR JALAN



Peraturan Pemerintah No. 30/2017 tentang Jalan Tol

Peraturan ini memungkinkan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan konsesi jalan tol atau melanjutkan konsesi yang ada untuk proyek jalan tol yang belum selesai oleh Pemerintah, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.

Peraturan ini juga menetapkan bahwa bagian pendapatan pemerintah dari total pendapatan dari proyek jalan tol selama masa konsesi dan / atau masa konsesi tambahan dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mengembangkan proyek jalan tol yang tidak bankable. **Skema tersebut meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia untuk memberikan dukungan fiskal ke proyek jalan tol seperti skema pembayaran yang tersedia.**

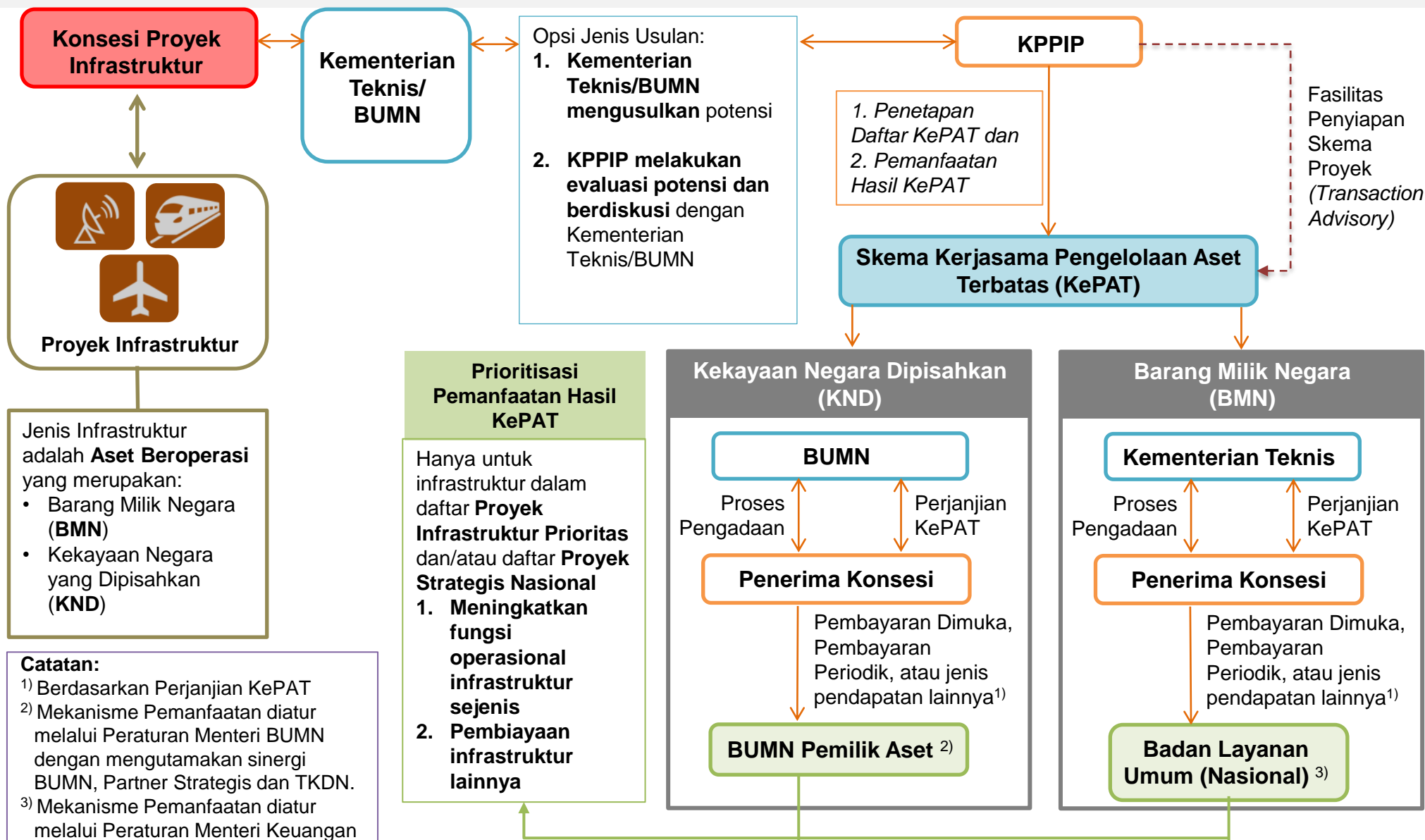
Regulasi Terdahulu: Peraturan Pemerintah. No. 15/2005



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1/2017 tentang Pengadaan dan Pengusahaan Jalan Tol

Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan panduan dan prosedur terperinci bagi pemangku kepentingan mengenai proses pengadaan konsesi jalan tol (proyek yang diminta atau tidak diminta) dan **untuk memastikan prosesnya transparan, kompetitif, efektif, dan efisien.**

Saat ini, pemerintah sedang menyusun landasan hukum untuk implementasi Skema Kerjasama Pengelolaan Aset Terbatas (KePAT)



Skema Kerjasama Pengelolaan Aset Terbatas (KePAT) memberikan berbagai keuntungan untuk pemerintah tanpa memindahkan kepemilikan aset

Keuntungan dari pengelolaan aset eksisting dapat diperoleh sementara **kepemilikan aset tetap pada Pemerintah¹**.

Pemasukan dana segar untuk pembangunan infrastruktur lain (*greenfield*)

Pendapatan yang diperoleh dari investor yang melakukan pengelolaan aset menjadi dana segar bagi pemerintah sebagai sumber dana baru di luar anggaran pemerintah. Pendapatan dapat digunakan spesifik untuk pembangunan infrastruktur *greenfield*, terutama untuk proyek yang kurang layak secara finansial, proyek di Indonesia timur, dsb. Selain itu, dana tersebut dapat diperoleh dengan cepat sehingga sesuai dengan tingginya urgensi kebutuhan dana Indonesia.

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak domino

Peningkatan efisiensi operasi proyek yang menggunakan skema pengelolaan aset dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pergerakan manusia, pergerakan barang, aktivitas konstruksi, dan perbaikan dukungan yang diberikan untuk industri dan perdagangan.

Meningkatkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia

Komitmen pemerintah yang kuat yang dicerminkan dengan menawarkan proyek-proyek yang layak untuk sekuritisasi atau konsesi sehingga menarik untuk investor. Suksesnya *pilot project* dengan skema pengelolaan aset dapat meningkatkan kepercayaan investor lainnya untuk masuk ke Indonesia karena *national due diligence* telah dilakukan. Investor yang masuk setelah *pilot project* dapat menggunakan *due diligence* tersebut untuk masuk ke proyek *greenfield* dan *brownfield* lainnya.

Mengoptimalkan operasi, efisiensi, manajemen aset eksisting dan alih pengetahuan

Pengelolaan aset eksisting dapat meningkatkan daya saing proyek tersebut dan secara umum Indonesia di tingkat regional maupun internasional dan dapat mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang dapat mereplikasikan pengetahuan tersebut untuk pengembangan proyek-proyek lainnya di Indonesia.

¹Jika aset eksisting dimiliki oleh BUMN, maka kepemilikan aset tetap berada pada BUMN tersebut



Progres Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas

Progres Kebijakan Pendukung Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2017

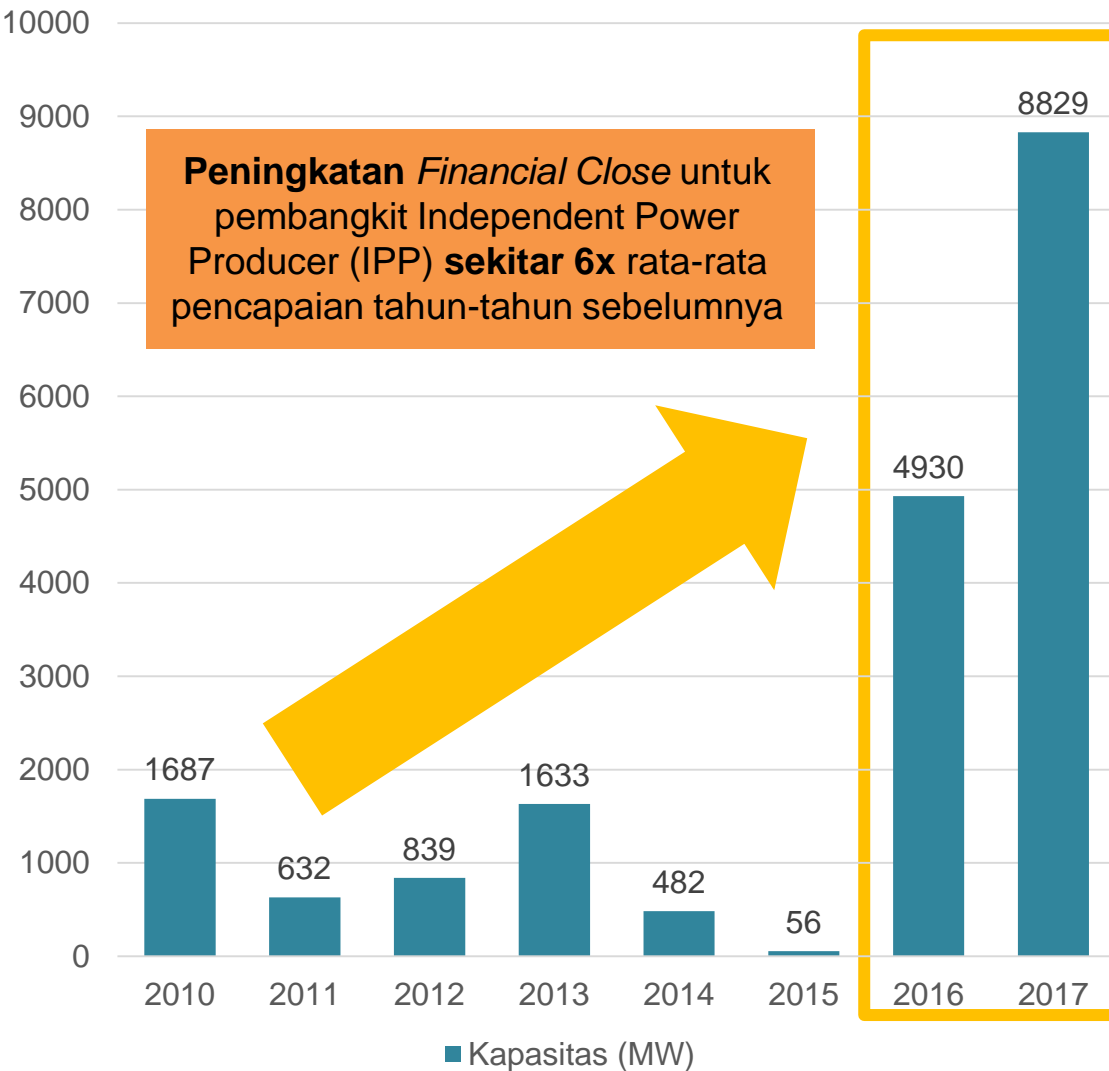
Pencapaian Infrastruktur pada Tahun 2017

Pada 2017, KPPIP telah memberikan dukungan *debottlenecking* pada penyediaan Proyek Prioritas

	PROYEK	FASILITAS	DAMPAK PADA PROYEK
2017	1 Pelabuhan Patimban	Dukungan dalam mempercepat penerbitan Izin Lingkungan (1 bulan)	Sebagai salah satu prasyarat penerapan pinjaman kepada donor, sehingga proyek dapat memperoleh kepastian pendanaan
		Dukungan dalam mengembangkan Masterplan Intermoda Pelabuhan Patimban	Memastikan konektivitas pelabuhan dengan jaringan transportasi dalam upaya mengantisipasi volume lalu lintas pelabuhan
	2 Pelabuhan Hub Internasional Bitung	Pengembangan Pra - Studi Kelayakan Pelabuhan Hub Internasional Bitung	Menjadi dasar dalam menentukan skema pendanaan dan pembangunan area terpadu
	3 Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	Reviu dan pemutakhiran Pra - Studi Kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Menghasilkan dokumen dengan data terbaru dan asumsi yang sesuai dengan standar sehingga dapat diterima pasar
	4 PLTU Batang	<i>Debottlenecking</i> pada isu terkait dengan pembebasan lahan dan perencanaan tata ruang	Penerbitan Surat Rekomendasi Pembaharuan Penetapan Lokasi dan surat penyelesaian masalah lahan berstatus Tanah Kas Desa
5 SPAM Umbulan	<i>Debottlenecking</i> isu untuk mempercepat penandatanganan Perjanjian KPBU dan <i>financial close</i>	Kesepakatan antara PJPK - Badan Usaha sehingga kondisi preseden dalam Perjanjian KPBU dan Perjanjian Pinjaman terpenuhi	

Contoh pencapaian infrastruktur di Sektor Energi dan Ketenagalistrikan adalah tercapainya *Financial Close* untuk pembangkit IPP yang meningkat sebesar 9.050 MW

Pencapaian *Financial Close* (2010-2017)



Daftar pembangkit IPP yang didukung KPPIP mencapai *Financial Close* 2016-2017

PEMBANGKIT	LOKASI	KAPASITAS
PLTU Batang	Jawa	2,000 MW
PLTP Muara Laboh	Sumatera	90 MW
PLTU Kaltim	Kalimantan	200 MW
PLTU Kaltim-4	Kalimantan	200 MW
PLTU Kalsel	Kalimantan	200 MW
PLTU Jawa-8	Jawa	1,000 MW
PLTU Jawa-4	Jawa	2,000 MW
PLTU Bengkulu	Sumatera	200 MW
PLTU Kalbar-1	Kalimantan	200 MW
PLTA Batang Toru	Sumatera	510 MW
PLTU Sulbagut-1	Sulawesi	100 MW
PLTU Sumsel-8	Sumatera	1,240 MW
PLTP Rantau Dedap	Sumatera	110 MW
PLTU Jawa-1	Jawa	1,000 MW
TOTAL KAPASITAS		9,050 MW

Sumber: Presentasi PLN Oktober 2017

Contoh pencapaian di Sektor Jalan dan Jembatan, Sektor Air dan Sanitasi, dan Sektor Transportasi dapat dilihat di tabel di bawah



Sektor Jalan & Jembatan

Proyek	Status pada akhir 2016	Status pada akhir 2017
Jalan Tol Manado-Bitung	Kemajuan pengadaan tanah baru mencapai 34,31%	Kemajuan pengadaan tanah mencapai 71,80%
	Kemajuan konstruksi baru mencapai 5,36%	Kemajuan konstruksi mencapai 23,36%
Jalan Tol Trans Sumatera	Pengadaan tanah pada 4 ruas prioritas tahap pertama rata-rata mencapai 74,21%	Pengadaan tanah pada 4 ruas prioritas tahap pertama rata-rata mencapai 92,69%
	Konstruksi pada 4 ruas prioritas tahap pertama rata-rata mencapai 28,10%	Konstruksi pada 4 ruas prioritas tahap pertama rata-rata mencapai 52,62% Ruas Medan-Binjai (Seksi 2&3) dan Palembang Indralaya (Seksi 1) telah beroperasi
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	Proses lelang Badan Usaha mencapai tahap pengumuman peserta yang lolos Prakualifikasi	Proses lelang telah mencapai tahap akhir dimana konsorsium PT Jasa Marga dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai pemenang
Jalan Tol Yogyakarta-Bawen	Persiapan pelaksanaan studi AMDAL dan Outline Business Case (OBC)	Penyusunan OBC telah mencapai tahap akhir Trase terpilih telah disepakati Gubernur DIY dan Jawa Tengah



Sektor Air & Sanitasi

Proyek	Status pada akhir 2016	Status pada akhir 2017
SPAM Semarang Barat	Belum terdapat OBC yang telah diperbaharui dan merepresentasikan kondisi terkini dari kelayakan proyek	Telah diselesaikannya OBC dan <i>real demand survey</i> dan dimulainya penyusunan FBC untuk kebutuhan lelang SPAM Semarang Barat
SPAM Bandar Lampung	FBC telah selesai dan dokumen lelang untuk pra-kualifikasi sedang disiapkan	Ditetapkannya konsorsium PT Bangun Tjipta Sarana dan PT Bangun Tjipta Konstruksi sebagai Badan Usaha Pelaksana



Sektor Transportasi

Proyek	Status pada akhir 2016	Status pada akhir 2017
LRT Sumsel	Konstruksi mencapai 33,43% namun belum dibentuk koordinasi <i>interface</i> pembangunan prasarana dan pengadaan sarana	Konstruksi mencapai 77,32% dan telah terbentuk koordinasi <i>interface</i> pembangunan prasarana dan pengadaan sarana
Pelabuhan Patimban	<i>Loan Agreement</i> belum ditandatangani	Telah ditandatangani pada 15 November 2017
	Pengadaan tanah belum dimulai	Penetapan Lokasi telah diterbitkan pada April 2017 dan sedang berkoordinasi dengan LMAN untuk implementasi pembayaran langsung dana pengadaan tanah

Untuk pencapaian dalam proyek KPBU yang dipantau KPPIP, telah terdapat *milestone* penting atas dukungan Pemerintah melalui reformasi kebijakan

Dukungan
Peyiapan
Proyek

Beberapa Capaian Pelaksanaan Proyek KPBU

Dukungan *Viability Gap Funding*



SPAM Umbulan (Rp 4,5 T) telah mencapai *Financial Close* pada bulan Desember 2016

Dukungan *Availability Payment*



Palapa Ring Broadband (Rp 5,8 T) telah mencapai *Financial Close*, untuk Paket Barat pada Agustus 2016, Paket Tengah pada September 2016 dan Paket Timur pada Maret 2017

Percepatan melalui Reformasi Regulasi Pengadaan Tanah



PLTU Batang (Rp 40 T) telah mencapai *Financial Close* pada 6 Juni 2016 dan proyek sudah masuk pada tahap konstruksi



Ditandatanganinya PPJT untuk tol **Balikpapan – Samarinda (Rp 9,9 T)**, **Manado – Bitung (Rp 5,1 T)**, **Pandaan – Malang (Rp 2,9 T)** pada Juni 2016, **Cisumdawu (Rp 8,4 Triliun)** pada Februari 2017, dan **Probolinggo – Banyuwangi (Rp 21 Triliun)** dan **Jakarta – Cikampek II Selatan (Rp 13,4 Triliun)** pada Desember 2017

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan kebijakan/dukungan bagi proyek infrastruktur

Mengambil sikap aktif untuk menciptakan semangat KPBU yang diinginkan dan mengenalkan kebijakan yang membantu investasi proyek infrastruktur

Reformasi
Kebijakan



TERIMA KASIH

KPPIP

Menara Merdeka, 8th floor

Jl Budi Kemuliaan I No 2, Jakarta 10110

E-mail : sekretariat@kppip.go.id

Landline : +62 21 2957 3771